

Menavigasi Dinamika Ganda Ruang Gerak Masyarakat Sipil **Gorontalo**

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik Provinsi Gorontalo
2025



Civic Engagement Alliance
2025



Potret Demografi, Ekonomi dan Daya Dukung Ekologis



Sumber: Esri, Maxar, Earthstar Geographics (2024)

Gambar 1. Peta Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dan secara geografis berada pada posisi strategis yang menghubungkan jalur daratan Sulawesi dengan wilayah perairan Indonesia bagian tengah, khususnya Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Posisi ini sejak abad ke-XIX telah menempatkan Gorontalo, terutama kawasan Kwandang, sebagai salah satu simpul perdagangan maritim regional, yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan distribusi komoditas pertanian, hasil hutan, dan produk laut yang diperdagangkan ke Manado, Ternate, hingga kawasan Maluku. Di samping itu, letak Gorontalo yang secara astronomis berada pada kisaran $0^{\circ}19' - 1^{\circ}15'$ Lintang Utara dan $121^{\circ}23' - 123^{\circ}43'$ Bujur Timur, menjadikannya salah satu provinsi yang dilalui garis khatulistiwa dan beriklim tropis basah. Wilayah ini memiliki suhu rata-rata tahunan sekitar $26 - 27^{\circ}\text{C}$, curah hujan tahunan berkisar $2.000 - 2.500$ mm, serta penyinaran matahari relatif tinggi sepanjang tahun sebagai membentuk kondisi agroklimat yang sangat mendukung pengembangan pertanian hortikultura, khususnya sayuran dataran rendah, buah tropis, dan komoditas pangan berbasis lahan kering dan pesisir.

Pada 5 Desember 2000, Gorontalo resmi ditetapkan sebagai provinsi otonom baru yang berpisah dari Provinsi Sulawesi Utara. Penetapan ini menandai gelombang awal pelaksanaan Otonomi Daerah pasca runtuhnya sentralisme birokratis Orde Baru. Setelah

lebih dari dua dekade, dinamika pembangunan di Gorontalo belum menunjukkan tercapainya tujuan Otonomi Daerah, seperti optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan yang sesuai kebutuhan lokal, serta pengurangan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,19 juta jiwa (2023), Gorontalo menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Sebanyak 23,73% penduduk pedesaan di Gorontalo masih hidup dalam kemiskinan, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang hanya 4,47%. Pada saat yang sama, struktur ekonomi Gorontalo pada 2023 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,50% yang ditopang sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan. Meski pertanian menjadi salah satu penyumbang terbesar PDRB dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tingginya kemiskinan di pedesaan menunjukkan bahwa pertumbuhan sektoral belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga pedesaan.

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat jika tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan kecenderungan menurun dalam periode 2020–2025, dari 15,22 persen pada Maret 2020 menjadi 13,24 persen pada Maret 2025. Dari sisi spasial, disparitas kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan masih sangat lebar. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan pedesaan tercatat 20,80 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 4,68 persen. Mayoritas penduduk miskin Gorontalo, 135,73 ribu orang, masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan yang menegaskan bahwa kemiskinan di Gorontalo bersifat struktural. Gini Ratio yang berada pada kisaran 0,389–0,406 selama lima tahun terakhir juga memperlihatkan bahwa distribusi pendapatan belum merata, sehingga sebagian kelompok berpendapatan rendah belum memperoleh manfaat pertumbuhan secara proporsional.

Selain dinamika pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di pedesaan, tekanan terhadap daya dukung lingkungan di Gorontalo meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Forest Watch Indonesia mencatat deforestasi sekitar ±35.770 hektar pada periode 2017–2023, sementara lebih dari 690 ribu hektare hutan alam berada dalam status terancam akibat perluasan perkebunan sawit, operasi pertambangan, dan pengembangan Hutan Tanaman Energi. Deforestasi paling banyak tercatat pada wilayah dengan tutupan hutan alam terbesar, terutama di Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara, serta Boalemo, yang menjadi lokasi utama konsesi perkebunan dan pertambangan.

Perubahan tutupan hutan di kawasan hulu DAS tersebut berkontribusi pada meningkatnya kejadian banjir dan banjir bandang di sejumlah wilayah, terutama di Pohuwato. Aktivitas tambang emas ilegal yang memasuki kawasan konservasi juga menambah tekanan terhadap lanskap hutan serta berpotensi memicu sengketa ruang antara masyarakat,

pemerintah, dan pelaku usaha. Kombinasi tekanan terhadap daya dukung ekologis ini merupakan bagian dari dinamika sosial dan ekonomi yang berdampak pada keberadaan OMS dan penciptaan ruang gerak masyarakat sipil yang di Gorontalo.

Penilaian Partisipatif Kondisi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik

Penilaian kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik yang dilakukan menggunakan instrumen CIVICA yang dikembangkan oleh Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia untuk membaca, memahami, dan merefleksikan ruang sipil dan ruang pelibatan masyarakat sipil berbasis dinamika dan konteks pada masing-masing wilayah di Indonesia secara partisipatif dan mandiri. Instrumen ini dirancang untuk menghadirkan proses belajar, perubahan, dan kolaborasi yang tumbuh di tingkat lokal dan regional.

Melalui dua arena/blok utama yaitu Civic Space dan Civic Engagement, CIVICA membantu masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan jejaring mitra memahami tiga aspek utama, yaitu, bagaimana ruang sipil terbuka dan dimanfaatkan, bagaimana masyarakat sipil memperkuat keterlibatan publik dan bagaimana konektivitas antaraktor dan antarwilayah berkontribusi pada keberlanjutan gerakan.

Refleksi Ruang Sipil dan Keterlibatan Masyarakat Sipil di Gorontalo

Organisasi masyarakat sipil (OMS) di Gorontalo menggelar pertemuan refleksi pada 15–16 November 2025 di Kantor Walhi Gorontalo yang dihadiri oleh Komunitas Sampul Belakang, Mappala Motolomoya, GMPA Mutiara, Salampuan (Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga), Inhides (Institute for Human and Ecological Studies), dan BPG (Binthe Pelangi Gorontalo). Pertemuan ini diinisiasi oleh Dr. Terri Repi dan Direktur Walhi Gorontalo, Defri, sebagai tindak lanjut dari diskusi mereka dengan Sekretariat CEA Nasional.

Proses penilaian CIVICA dimulai dengan pemetaan wilayah kerja OMS yang berbasis pada isu. Hasil pemetaan ini menunjukkan jika sebaran kerja OMS digerakan oleh isu yang kompleks dan berada di empat wilayah utama yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Bone Bolango. Sementara dua wilayah lain relatif belum tersentuh intervensi OMS akibat hambatan geografis, keterbatasan SDM organisasi, dan minimnya dukungan pendanaan. Kondisi ruang gerak ini diperparah oleh situasi krisis multidimensi di wilayah seperti Pohuwato dan Gorontalo Utara yang mencakup degradasi sumber daya alam, persoalan kesehatan, serta kekerasan ruang hidup yang mengancam keselamatan aktivis lingkungan.

Penilaian ini juga menunjukkan jika tantangan masyarakat sipil yang mencakup aspek internal mencakup belum terbangunnya konsolidasi advokasi bersama, lemahnya

perlindungan dan penguatan kapasitas aktivis, terbatasnya pendanaan OMS, serta rendahnya kapasitas Masyarakat. Sedangkan pada aspek eksternal, tantangannya berupa rendahnya kesadaran publik terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, stigma terhadap ODHA, diskriminasi terhadap minoritas gender (LGBTIQ+), melemahnya solidaritas sosial, serta sempitnya ruang keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat sipil; situasi ini berkorelasi dengan tingginya eksploitasi di wilayah pusat-pusat ekonomi yang tidak terpisahkan dari tingginya kasus HIV, serta maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilegitimasi praktik “kawin turun”, ketiadaan perlindungan sosial, dan meningkatnya kerentanan kelompok transpuan dibandingkan perempuan pada umumnya.



Pada aras yang lebih besar, ruang sipil di Gorontalo menunjukkan dinamika ganda berupa peluang dan pembatasan. Beberapa regulasi progresif, seperti Perda Provinsi No. 5 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, memperkuat kerangka layanan kesehatan masyarakat. Namun, kebijakan administratif terbaru

termasuk Surat Edaran Kabupaten Gorontalo (April 2025) dan Surat Edaran Gorontalo Utara (Mei 2025) yang melarang keterlibatan waria dalam kegiatan sosial mengindikasikan pembatasan kebebasan berekspresi dan peningkatan risiko diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender. Konflik agraria yang berlangsung selama lebih dari satu dekade terkait perkebunan sawit juga menunjukkan pola kriminalisasi terhadap petani dan pembela lingkungan. Kondisi ini menempatkan ruang sipil Gorontalo dalam kategori rentan, dengan tekanan terhadap kebebasan berorganisasi dan risiko bagi aktor-aktor advokasi lokal secara terus menerus.

Catatan Kritis terhadap Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik di Gorontalo

Penilaian, eksplorasi dan refleksi berbasis CIVICA di Gorontalo membuka gambaran yang lebih fundamental tentang kondisi ruang sipil melalui tujuh dimensi yang saling terkait dan menopang keberadaan ruang sipil tersebut. Gambaran singkat dari refleksi terhadap 7 dimensi dari blok Kondisi Ruang Sipil (Civic Space) dan Keterlibatan Publik (Civic Engagement) adalah sebagai berikut.

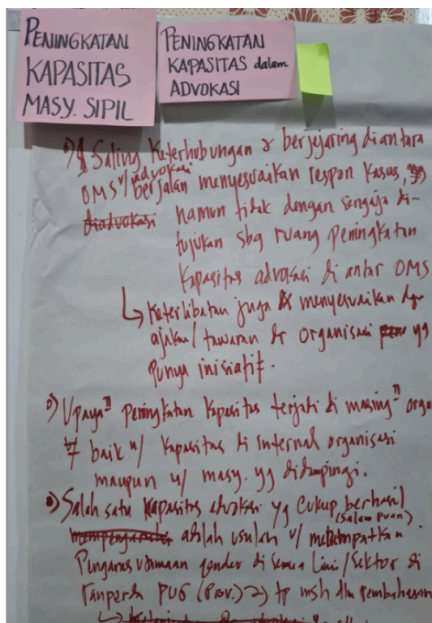
Dimensi Pengorganisasian Basis dan Komunitas

Narasi mayor yang membayangi OMS lokal adalah stigma sosial, dari anggapan “kiri” terhadap kelompok literasi, tuduhan anti-pembangunan kepada aktivis lingkungan, hingga stereotip terhadap aktivis HIV dan komunitas LGBTIQ+. Perlawanan yang dilakukan adalah membongkar stigma melalui komunikasi yang lebih jelas, membangun pendekatan yang mengakar ke masyarakat, serta memperkuat ruang-ruang inklusif. Ketahanan pengorganisasian basis dan komunitas dipelihara dengan strategi sederhana yang menguatkan solidaritas kolektif, seperti patungan, berbagi sumber daya, kaderisasi, dan kolaborasi lintas komunitas untuk memastikan perlindungan kepada kelompok dampingan. Di sisi yang lain, meski jejaring lintas isu sudah tumbuh secara organik, mereka belum terkelola sebagai kekuatan kolektif yang menopang ketahanan basis.

Rekomendasi Prioritas

Menghidupkan ruang temu Masyarakat sipil Gorontalo untuk penguatan kerja kerja pengorganisasian.

Dimensi Kapasitas Organisasi Masyarakat



Terutama dalam advokasi dan pengelolaan pengetahuan. Kapasitas advokasi dalam ekosistem gerakan Gorontalo lebih banyak lahir dari respons terhadap kasus atau bersifat sectoral, misalnya isu perempuan dan anak, bukan dari ruang belajar bersama yang dirancang secara sistematis. Di sisi lain, sistem pengetahuan antarorganisasi masih berjalan sendiri-sendiri tanpa mekanisme kolektif, meski sudah ada inisiatif seperti media Lipunaratif yang dikelola AJI. Begitu pula dengan aspek perlindungan: setiap lembaga memiliki pendekatan masing-masing dalam mengelola keamanan aktivis, namun belum ada standar bersama yang menjadi acuan seluruh ekosistem masyarakat sipil.

Rekomendasi Prioritas

Menghidupkan ruang-ruang belajar regular dan komprehensif terkait advokasi, perlindungan akvis, termasuk untuk saling menguatkan perspektif (interseksionalitas isu)

Dimensi Konektivitas Masyarakat Sipil

Penilaian menunjukkan bahwa hubungan antar OMS masih bertumpu pada relasi personal dan kesamaan isu, bukan pada kepentingan gerakan bersama. Tidak ada database yang memetakan kapasitas dan profil organisasi lokal secara menyeluruh. Walaupun beberapa organisasi telah menjalin komunikasi hingga tingkat nasional dan internasional, seperti InHides dengan jaringan riset RIHN. Konektivitas tersebut belum mengalir menjadi penguatan ekosistem regional. Kebutuhan akan ruang connecting yang mempertemukan berbagai sumber daya, kepakaran, dan informasi sangat kuat dalam diskusi para peserta.

Rekomendasi Prioritas

Mengembangkan wadah/ruang connect ng bersama Masyarakat sipil untuk menjawab keterhubungan sharing info, sumber daya, konektivitas kerja.

Dimensi Mobilisasi Sumber Daya

Penilaian pada aspek ini menggambarkan dinamika kreatif tetapi tidak stabil. Tidak ada dana kolaboratif yang berkelanjutan; yang ada hanyalah dukungan sesaat untuk event seperti festival, diskusi, dan kampanye. Kapasitas negosiasi dengan donor masih lemah, terutama bagi organisasi kecil. Sumber daya bersama dikembangkan melalui patungan anggota, penyewaan buku, sponsorship acara, penjualan merchandise, hingga usaha kedai kopi komunitas. Meski menunjukkan kreativitas, pola ini belum mampu menopang keberlanjutan jangka panjang sehingga diperlukan kajian bersama untuk merumuskan model diversifikasi pendanaan.

“Tidak ada database bersama dalam organisasi masyarakat sipil di Gorontalo. Profil lembaga terdistribusi melalui informasi dan komunikasi personal. Komunikasi tentang kepakaran terjadi di jaringan lembaga masing-masing atau di jaringan dalam gerakan yang sama melalui group WA, dll.”

Rekomendasi Prioritas

Melakukan kajian bersama untuk menemukan model diversifikasi pendanaan yang bisa diakses oleh organisasi/komunitas.

Dimensi Regulasi Pendukung

Refleksi para peserta memperlihatkan dualitas kalau bukan kontradiksi: di satu sisi terdapat perda-perda yang progresif, seperti perlindungan anak, bulan literasi, dan kebijakan

dukungan PUG; namun di sisi lain muncul kebijakan-kebijakan yang secara nyata menghambat ruang sipil, antara lain Surat Edaran yang diskriminatif terhadap waria, Perda anti-maksiat, serta kebijakan tata ruang yang membuka jalan bagi ekspansi sawit dan Hutan Tanaman Energi. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya mengancam ruang hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan terhadap aktivis dan kelompok rentan. Meskipun masyarakat sipil Gorontalo memiliki rekam jejak tertentu dalam mempengaruhi kebijakan, advokasi yang lebih terkoordinasi masih belum terbangun.

Rekomendasi Prioritas

Membangun kolaborasi untuk aksi-aksi advokasi.

Dimensi Konsolidasi dan Narasi Advokasi

Konsolidasi yang berkembang sejauh ini biasanya lahir dari respons terhadap kasus tertentu, misalnya isu kekerasan perempuan dan anak atau sikap penolakan terhadap kebijakan diskriminatif, namun belum berkembang menjadi gerakan lintas isu yang memiliki visi jangka panjang. Narasi alternatif berbasis budaya lokal sebenarnya sudah tersedia, seperti falsafah mohuyula yang digunakan komunitas seni sebagai bingkai gotong royong, tetapi belum dimobilisasi secara lebih luas. Ruang publik juga belum aman dan inklusif, terutama bagi minoritas gender dan penyandang disabilitas, sehingga advokasi GEDSI masih sangat terbatas.

Rekomendasi Prioritas

Membangun visi dan peta jalan advokasi bersama Masyarakat sipil.

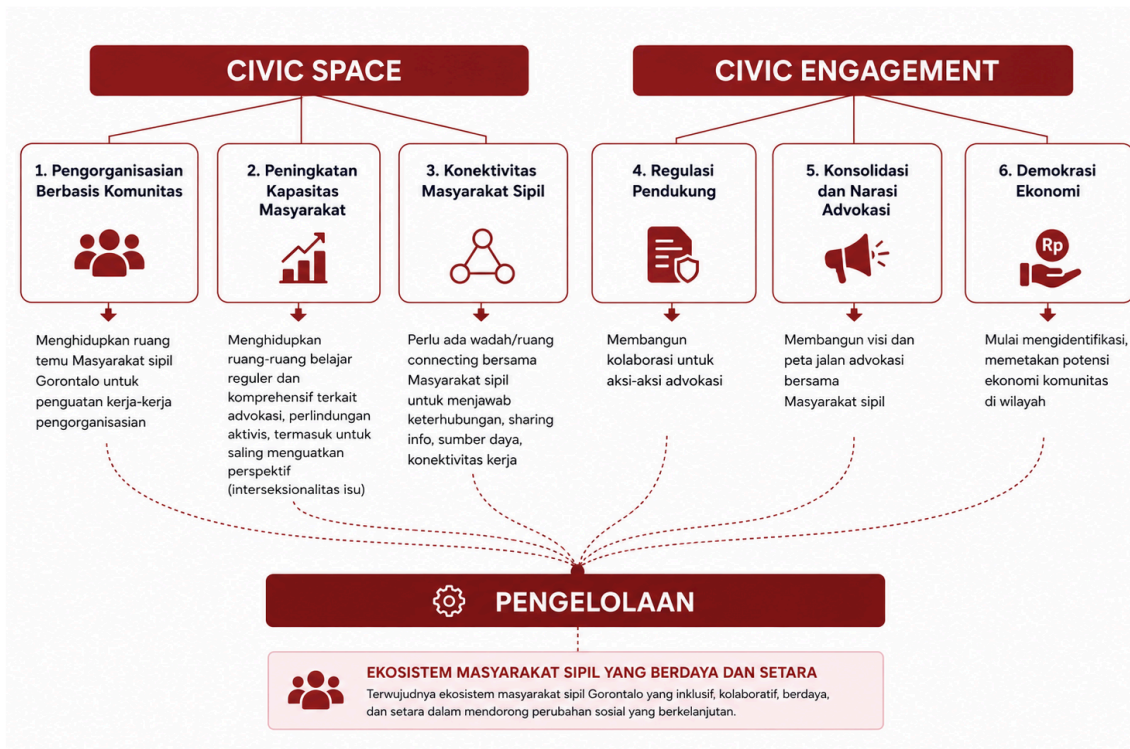
Dimensi Demokrasi Ekonomi

Menunjukkan geliat yang hidup tetapi belum menjadi fondasi ekonomi gerakan. Berbagai prakarsa komunitas, dari pasar Ambuwa dengan sistem koin batok, budidaya lebah, eco-print, hingga usaha kedai kopi kolektif menunjukkan bahwa masyarakat mampu membangun sistem ekonomi alternatif yang berbasis pada solidaritas dan produksi lokal. Bahkan ada model kelembagaan inklusif di tingkat desa yang mempraktikkan pengambilan keputusan tanpa hierarki. Namun sebagian besar usaha ini masih berada dalam tahap pemenuhan kebutuhan dasar, belum bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang menopang keberlanjutan gerakan, karena belum tersedianya pemetaan potensi ekonomi komunitas secara menyeluruh.

Rekomendasi Prioritas

Mulai mengidentifikasi, memetakan potensi ekonomi komunitas di wilayah.

Sesi refleksi terhadap ruang sipil dan ruang keterlibatan menghasilkan rangkuman semua rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diterjemahkan ke dalam bentuk diagram alur sebagai berikut.



Kesimpulan

Dari refleksi terhadap tujuh dimensi dan sembilan belas subdimensi terhadap arena civic space dan arena civic engagement yang dilakukan oleh para peserta, tergambar jika ekosistem masyarakat sipil Gorontalo memiliki pondasi solidaritas dan kreativitas yang cukup kuat di tengah kebebasan politik yang menyempit dan stigmatisasi terhadap OMS. Namun elemen solidaritas dan kreativitas tersebut belum memiliki ruang tumbuh kolektif, konektivitas, dan strategi yang memungkinkan potensi itu bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang di aras lokal. Keseluruhan refleksi mengarah pada satu kebutuhan besar yakni membangun ruang temu, ruang belajar, ruang konektivitas, dan peta jalan advokasi bersama agar masyarakat sipil Gorontalo dapat bergerak lebih strategis, aman, dan saling menguatkan.